

## **RELASI KUASA DALAM DEMOKRASI INDONESIA**

Oleh:

Rudi Rohi

FISIP Universitas Negeri Cendana

### **ABSTRAK**

Demokrasi Indonesia bagaikan putaran roda dengan kecepatan bervariasi. Hal ini menentukan akselerasi dan arah menuju kesejahteraan dapat berantakan atau berbalik arah. Kesejahteraan belum juga tampak di pelupuk mata tetapi kemiskinan justru kian memprihatinkan. Praktek demokrasi sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi ternyata hanya ritual politik rezim. Relasi kuasa di antara para elit dan aktor demokrasi tidak berjalan di atas rel menuju konsolidasi demokrasi. Justru tabiat labil permanen menjadi pemandangan demokrasi di tanah air. Bersandar pada pendekatan elit dan relasi faktual dari sejumlah kasus dan literatur, tulisan ini mengidentifikasi simpul-simpul dan raut relasi kuasa di antara para elitnya. Diawali dengan gerakan koreksi pada penggalan 1970an kemudian dilanjutkan dengan pembredelan pers pada penggalan awal 1990an hingga masa reformasi. Seluruhnya tak terhindar dari keretakan dan ketimpangan relasi kuasa di antara para aktornya. Akibatnya demokrasi Indonesia tidak berjalan pada aras kontekstual kebutuhan bangsa, tidak mutual, dan tidak komprehensif.

Kata Kunci: Demokrasi, Relasi Kuasa, Elit, dan Aktor

### **ABSTRACT**

Indonesia democracy is just like spinning wheels with different speed. It determines the acceleration and direction to prosperity weather succeed, cluttered, or reversed. Welfare is not appeared yet but poverty has increasingly alarming. The practice of democracy since the Old Order, New Order, until the Reformation only been political ritual regime. Power relations between elites and democratic actors did not walk on the right tracks towards the consolidation of democracy. Precisely permanent labile being nature of democracy in politics landscape of its country. Relying on the approach of the elite and factual relations from several cases and literatures, this paper identifies the nodes and the expression of power relations among the elite. It is started from the motion correction in 1970s followed by a piece of media bans in the early 1990s until the piece of reform. Not entirely avoid cracks and inequality of power relations

between the actors. Consequently democracy Indonesia is not running at the level of contextual needs of the people, not even mutual or comprehensive.

Keywords: Democracy, Power Relations, Elite(s), and Actor

## **I. PENDAHULUAN**

Jika boleh berandai, demokrasi di Indonesia ibaratnya roda yang berputar dengan kecepatan bervariasi. Varian kecepatan mengakibatkan akselerasi demokrasi menuju kesejahteraan cenderung timpang bahkan arahnya dapat berantakan atau berbalik ketika tiba di tikungan atau tanjakan dalam kecepatan tidak sesuai. Dengan begitu kesejahteraan sebagai cita-cita demokrasi tak mudah untuk dicapai.

Halnya dengan kecepatan dan arah yang ditentukan oleh kecepatan tersebut, tak pernah diketahui di mana letak kesejahteraan itu. Pun proses perputarannya tak pernah terkawal baik dan tak bisa diprediksikan tingkat resiko guna menciptakan atau menemukan pola dan model yang tepat. Jikapun ada maka hanya merupakan “improvisasi” pemimpin populis yang tidak berkelanjutan karena semata-mata didasarkan legitimasi prosedural dari rakyatnya. Ketika perputaran memberi guncangan di sana-sini, rasionalisasi jamak dan berlebihan terhadap demokrasi menjadi argumen pembenar yang kemudian ditetapkan sebagai rel yang tak pernah terkonsolidasi namun dalam tabiat labil permanen. Praktek demokrasi pun bagaikan perluasan atau ekspansi tanpa kesesuaian dengan konteks lokal.

Andaikan terus menerus seperti ini, demokrasi sebagai proses tak akan memberikan kesejahteraan. Paling tidak sebelum sampai pada kesejahteraan, demokrasi Indonesia sudah kehabisan bahan bakarnya dan ditinggalkan untuk kemudian mencari praktek yang baru dan berbeda. Pengalaman bangsa ini telah membuktikannya, Demokrasi Terpimpin ala Soekarno kandas dan diganti oleh Demokrasi Pembangunan ala Soeharto yang juga tumbang. Senada dengan itu, reformasi 1998 belum mampu masuk dalam konsolidasi demokrasi yang mapan sehingga belum mencapai cita-cita kesejahteraan hingga detik ini.

---

Kemiskinan di Indonesia dalam angka bisa jadi menurun namun secara kualitas justru semakin memprihatinkan. Angka kemiskinan hingga tahun 2011/ 2012 memang telah menurun menjadi 12,49% dari 14,15% di tahun 2009 dan 13,33% di tahun 2010 (BPS, 2010, 2011, 2012) namun garis kemiskinan justru meningkat 6,40% di tahun 2012 dimana garis kemiskinan makanan mencapai 73,50% ([www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id), 9/12/2012).

Tidak itu saja, perbedaan data angka kemiskinan di antara pemerintah (BPS), lembaga internasional, dan NGO's lokal menjadi bukti bahwa sesungguhnya kemiskinan belum menjadi isu terpadu milik kolektifitas untuk diantaskan bersama. Data angka kemiskinan menurut BPS sebesar 31,02 juta orang miskin di tahun 2011 namun di tahun 2012 angka berbeda secara ekstrim ditunjukkan oleh Pendataan Program Perlindungan Sosial dimana jumlah orang miskin sebesar 96,7 juta orang miskin (Societa, Edisi 1 Tahun 2012). Artinya ada perbedaan angka juga pada tahun 2011 karena tidak mungkin hanya dalam satu tahun terjadi peningkatan kemiskinan dari 31,02 juta menjadi 96,7 juta jiwa. Kemiskinan hanya menjadi isu mempercantik demokrasi atau sebaliknya demokrasi menemukan ruang persembaiannya dalam isu kemiskinan.

Demokrasi di tanah air terus berjalan sempoyongan tanpa tahu kapan mencapai kestabilan dengan pola dan model yang tepat hingga tak pernah bisa beranjak ke titik kesejahteraan. Demokrasi seolah menjadi proses yang itu-itu saja (tesis) tanpa bisa menghasilkan antitesis apalagi sintesis agar makin nyata realisasi kesejahteraan. Dalam proses inilah kemudian kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan merubah wajah demokrasi menjadi demagogi yang justru mengorbankan dan memakan rakyatnya sendiri. Pemegang delegasi kedaulatan menggunakan kesempatan dan kekuasaan hanya untuk mensejahterakan penguasa dan kroninya. Siapa berkuasa pasti akan berada dan tinggal bersama kesejahteraan.

Semua menjadi wajar saat kolektifitas kesejahteraan yang ingin dicapai tak pernah diketahui rimbanya. Nafsu lahiriah manusia sebagai yang tak pernah puas melengkapi kewajaran ini. Proses politikpun hanya menjadi ajang untuk memperoleh kekuasaan agar dalam perputaran roda segera kesejahteraan dapat

---

diperoleh hanya bagi segelintir orang atau kelompok yang memegang kekuasaan. Perampokan terhadap hak bersama berlangsung dalam kemasan demokrasi yang sangat lembut dan elegan terlegitimasi tanpa bisa dihalangi.

Laksana trisula yang dijadikan cangkul menggemburkan tanah guna menjadi subur, hujamannya tidak kunjung menggemburkan tapi malah menciptakan lubang di mana-mana. Praktek demokrasi penuh cacat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan pemilu dapat direkayasa lewat politik uang atau kekerasan dan sebagainya. Lubang-lubang ini kemudian menjadi jebakan demokrasi yang memerosokan rakyat ke dalamnya lalu penguasa melangkah di atasnya menuju lahan yang baru lagi. Begitu seterusnya.

Andaikan trisula demokrasi dilukiskan sebagai pemerintah, rakyat, dan modal (ranah bisnis) yang terangkai sebagai negara, relasi dan interaksi yang menyertainya adalah timpang. Relasi dan interaksi antara pemerintah dan rakyat adalah menegaskan kedaulatan rakyat. Sementara relasi dan interaksi rakyat dan modal melahirkan ketergantungan rakyat sebagai konsumen. Pada saat yang sama, relasi dan interaksi pemerintah dan modal justru menghasilkan konspirasi modal dan kekuasaan secara indah dengan terlegitimasi oleh pembodohan dan kemiskinan masyarakat.

Tulisan ini mencoba secara singkat menguraikan letak persoalan yang ada pada relasi kuasa antar aktor dan antar struktur dalam interaksinya sebagai negara. Hal ini penting dilakukan untuk kemudian menemukan gagasan guna merumuskan – paling tidak sebagai ide awal – input dan kritik terhadap kerangka konsep *power, welfare, and democracy* yang sedang digagas, pembaharuan di ranah kenegaraan, ranah kemasyarakatan dan ranah bisnis yang perlu dilakukan menuju demokrasi yang mensejahterakan, dan merancang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menopangnya dalam tanggung jawab intelektual.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Retaknya Relasi Kuasa Antar Aktor Demokrasi**

Berkaca dari sejarah, mungkin bisa disepakati bahwa relasi dan inetraksi antar aktor demokrasi hanya mampu sebatas meruntuhkan rezim otoriterisme

---

tanpa bisa menegakan dan mengkonsolidasikan demokrasi. Pengalaman rezim Orde Baru mencatat bahwa gerakan meruntuhkan otoriterisme berlangsung simultan – meskipun sporadis di awalnya – hingga puncaknya pada 1998. Dan setelahnya demokrasi kembali berjalan sempoyongan.

Cerita gerakan pro demokrasi oleh aktor-aktornya dalam interaksi dan pola relasi yang berimbang terlihat jelas dipertengahan pergerakan. Seperti yang disampaikan secara luar biasa oleh Budiman dan Törnquist dimana dimulai dengan gerakan sporadis dan spontan sebagai gerakan koreksi oleh beberapa pemuda dan mahasiswa di Jakarta pada penggalan awal 1970-an, aktor-aktor pro demokrasi ini walaupun tanpa relasi dan interaksi dengan aktor-aktor lain melakukan kritik terhadap para pembantu presiden yang korup. Gerakan ini lalu berubah menjadi gerakan konfrontasi pada 1978 oleh mahasiswa di Bandung dengan sasarannya Presiden Soeharto.

Selanjutnya lewat represi Soeharto, gerakan-gerakan pro demokrasi mulai menjamah lokus regional bahkan internasional semisal peristiwa Kedung Ombo 1988 dan gerakan pers pada 1994 akibat pembredelan terhadap media pers – Tempo, Editor, dan Detik – yang kritis terhadap pemerintah. Gerakan pro demokrasi ini kemudian tidak lagi merupakan gerakan sporadis, spontan, dan individual semata, tetapi mulai menemukan bentuk institusionalnya pada saat muncul gerakan partai politik sebagai suatu gerakan kelembagaan yang dipunggawai oleh Megawati Soekarno Putri pada penggalan 1990-an (Arief Budiman dan Olle Törnquist, 2001). Muaranya pada 1998 Soeharto harus merelakan kekuasaannya diambil alih oleh kekuatan pro demokrasi. Ironisnya, diujung keberhasilan meruntuhkan rezim otoriter, relasi dan interaksi aktor demokrasi kembali ke titik nol.

Terbentuknya relasi kuasa antar aktor yang berhasil menghadirkan demokrasi di bumi nusantara ternyata tidak berjalan seterusnya. Wajah relasi dan interaksi yang terjadi berikutnya adalah justru saling menelikung yang menyebabkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu tidak bisa menempatkan Megawati sebagai Presiden. Poros Tengah muncul sebagai kekuatan ketiga di legislatif membangun argumen koalisi yang sangat luar biasa

---

hingga mendudukan Gus Dur sebagai pemimpin bangsa ini. Di titik inilah sesungguhnya merupakan awal retaknya relasi kuasa antar aktor pro demokrasi yang telah terinstitusionalisasi dengan baik sebelumnya. Meskipun kemudian gebrakan-gebrakan Gus Dur cukup membuka ruang bagi rekonsolidasi aktor-aktor demokrasi namun kemudian beliau pun harus rela melepas kursi presiden setelah 2 tahun lebih menjabat.

Perjalanan selanjutnya muncul intrik-intrik politik dimana rakyat menjadi penonton dari drama demokrasi yang diperankan oleh para aktor politik dalam interaksi pola relasi kuasa yang tak lagi utuh. Pergantian kepemimpinan dari Gus Dur ke Megawati tidak melalui suatu jalan demokrasi yang normal tapi justru dengan argumen demokrasi atas nama rakyat, Gus Dur di *impeachment*. Ruang demokrasi tergerus oleh pertikaian antar aktor dalam interaksi dan relasi kuasa yang melemahkan dan memperlambat akselerasi demokrasi. Pertikaian dalam diam antara Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir setelahnya juga merupakan satu dari sekian banyak intrik politik yang semakin menyuburkan retaknya relasi kuasa antar aktor demokrasi ketika gerbong yang dibonceng masing-masingnya ikut bergejolak.

Persoalannya tidak berhenti di situ saja, otonomi daerah yang dihasilkan rezim reformasi bukannya merealisasikan spirit demokrasi yang dikandungnya tetapi semakin memberikan ruang untuk terjebaknya relasi kuasa antar aktor dalam bagi-bagi kekuasaan. Keterjebakan ini tak pelak lagi membangkitkan dan memberikan ruang bagi kekuatan lama untuk bermetamorfosis (Richard Robison and Vedy R. Hadiz, 2004) dan kembali masuk berinteraksi serta mengambil bagian dalam relasi kuasa antar aktor. Kian ironis tat kala relasi kuasa yang terbangun antara aktor negara dan aktor bisnis ini mengkreasi konspirasi modal dan kekuasaan yang ketika dihadapkan dalam relasinya dengan rakyat justru hasilnya adalah rakyat kembali terperangkap dalam jebakan-jebakan demokrasi yang menindas. Sekali lagi rakyat harus tersungkur dan dikorbankan.

---

## **B. Relasi Kuasa Antar Struktur Yang Timpang**

Relasi kuasa antar aktor tidak berjalan sendiri sebagai bidikan persoalan tetapi ada relasi kuasa antar struktur yang juga ikut menguatkannya. Kian sempurna kekejamannya saat relasi kuasa antar struktur berjalan tidak seimbang juga dengan menempatkan rakyat dalam ketiadaan dan ketertindasan oleh kemiskinan. Asosiasi dan kelas sosial kultural masyarakat sebagian besarnya telah runtuh oleh hantaman represifitas Orde Baru dan kalaupun ada pasti telah ditaklukan dalam penyeragaman yang dimainkan lewat birokrasi dan militer.

Dominasi pada *street level* oleh birokrasi sipil maupun militer diperoleh lewat pembenturan secara sengaja dua instrumen politik Orde Baru ini dengan kelas dan asosiasi sosial kultural masyarakat pada tingkat geopolitik paling hakiki yakni desa sebagai rumpun *klan*. Akibatnya rakyat kehilangan daya komunikasi dan kontrol terhadap pemerintah. Bahkan fenomena kuningisasi yang di masa lalu pernah terjadi di pedalaman dengan mengancam para kepala suku untuk tidak menolak warna tersebut berhasil menegakan kepatuhan tanpa syarat kepada pemerintah. Di pedalaman NTT dan Papua hal ini masih tersisa dan terus menggejala hingga kini, kepatuhan masyarakat terhadap orang-orang dengan seragam birokrasi dan militer. Padahal Moore (1966) misalnya menjelaskan demokrasi bukan merupakan inisiatif elit semata tetapi ada hubungan timbal balik antara 4 struktur kekuasaan yakni kelas petani, kelas pemilik tanah, kelas borjuis dan negara.

Kekuasaan dalam bentuk kewenangan legal formal ala Weberian telah menciptakan birokrasi modern yang melemahkan – tak jarang menghancurkan – struktur-struktur tradisional maupun kharisma. Struktur-struktur adat kehilangan daya dan batas kekuasaannya, kelas sosial semisal petani, buruh, dan sejenisnya terjinakan dan tidak lagi mempunyai kesadaran sebagai kelas yang harus memperjuangkan diri dalam relasi kuasa antar struktur guna mencapai demokrasi yang diinginkan. Hal ini diikuti juga dengan strategi massa mengambang yang diterapkan pemerintah Orde Baru. Tujuannya membunuh partisipasi politik kepartaian yang inheren dengan akses politik rakyat.

---

Setelah era demokrasi dimana partai politik mendapat ruang lebih, kedaulatan rakyat tetap saja menjadi slogan tak bermakna. Fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi lembaga legislatif sebagai manifestasi pendelegasian kedaulatan rakyat sirna dalam relasi kuasa bertajuk konspirasi dan koalisi berpayung oligarki. Ego, kepentingan politik, dan sentralisasi partai politik adalah penyebab paling mendasar dan dominan bagi tidak bekerjanya lembaga perwakilan rakyat. Pada titik inilah kedaulatan rakyat lenyap direbut oleh partai politik yang ditunggangi oleh para aktor-aktor beserta kepentingan-kepentingannya. Kontrol atas penyelenggaraan negara oleh rakyat atas nama kedaulatan dirampas dan dibatasi hanya pada ritual demokrasi 5 tahun sekali dan bukan proses interaksi di dalam perjalanan menuju dan mengisi 5 tahun itu.

Bersamaan dengan itu, relasi kuasa yang terbangun antara struktur modal (bisnis) dengan rakyat menciptakan konsumerisme individualistik. Ini menyebabkan sulitnya pembentukan kelas sosial dan tidak bekerjanya asosiasi-asosiasi sosial kultural masyarakat. Bayangan masyarakat sipil sebagai aktor maupun arena hadir di tengah-tengah interaksi demokrasi sulit menjadi kenyataan. Akibatnya ruang demokrasi hanya menjadi ajang akumulasi modal dan ketergantungan masyarakat terhadap penguasa dan pemodal. Struktur modal hanya melahirkan asosiasi dan kelas pengusaha yang dalam relasi dan interaksinya justru bersama negara berkonspirasi dalam persilangan modal dan kekuasaan. Akibatnya ruang ekonomi dan politik dimonopoli struktur-struktur tersebut, struktur negara dan struktur modal yang saat keduanya berinteraksi dengan rakyat hanya membentuk relasi kuasa berwajah penindasan dan penghisapan.

Berangkat dari uraian ini, hal menarik yang dapat ditarik adalah persoalan demokrasi memang adalah persoalan bersama. Akan tetapi letak persoalan mendasarnya bukan saja pada ruang politik rakyat karena memang rakyat telah kehilangan ruang tersebut. Lokusnya berada di seputar ranah negara dan elit politik-ekonominya, termasuk dalam relasi dan interaksinya sebagai aktor maupun struktur. Satu-satunya persoalan yang ada pada ranah rakyat adalah struktur dan kelas sosial kultural harus dihidupkan agar muncul arena bagi

---



interaksi aktor-aktor masyarakat sipil maupun demokrasi sehingga tercipta perimbangan kekuasaan dalam relasi antara negara dengan rakyat. Mengembalikan ruang politik rakyat sampai tingkat yang paling kecil menjadi tak terhindarkan.

Jika tidak maka penyeragaman nilai dan standarisasi demokrasi yang dipaksakan oleh struktur modal berkonspirasi dengan kekuasaan negara mengikuti universalisme menjadi tidak terkritisi ketika struktur rakyatnya tidak ada dan distribusi kesejahteraanpun tidak mungkin terjadi. Benteng demokrasi yang paling ampuh yakni rakyat perlu diberdayakan untuk ini lewat penemuan kembali titik penghubung antara kedaulatan rakyat dengan ruang delegasinya guna terbangunnya relasi kuasa rakyat, pemerintah dan modal secara komplementer. Prasyarat di atas haruslah tersedia sebelum menghadirkan demokrasi kontekstual. Jika tidak maka demokrasi kontekstualpun hanya akan menjadi demokrasi konspiratif menuju kesejahteraan penguasa yang terlokalisir pada lokalitas-lokalitas semata.

Dengan demikian 2 persoalan paling besar yang dapat menjadi bidikan proses aksi refleksi untuk demokrasi berkualitas menuju kesejahteraan terletak pada relasi kuasa antar aktor dan struktur. Hal ini dikarenakan aktor dan struktur tidak dapat berjalan sendiri. Keduanya secara komprehensif merangkai proses demokrasi dalam penyeimbangan kekuasaan yang pada gilirannya akan membawa demokrasi pada titik kesejahteraan bersama.

Penjelasan ini sekaligus menjadi jawaban dari tesis-tesis demokrasi yang gagal menjawab persoalan demokrasi di Indonesia. Lipset (1959) misalnya yang menyatakan bahwa hanya negara dengan ekonomi mapan yang dimungkinkan untuk berkembangnya demokrasi tidak masuk sama sekali dengan kondisi Indonesia. Justru demokrasi di Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi.

Atau seperti Huntington (1984) yang menyatakan bahwa tingkat melek huruf dan rendahnya konflik sosial sangat mempengaruhi keberhasilan demokrasi suatu negara ternyata sulit untuk bisa diterima dengan kondisi Indonesia. Pengalaman Portugal dan beberapa negara di Amerika Latin juga sulit

---

membenarkan tesis-tesis di atas. Dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah, Portugal cukup berhasil membangun interaksi sosial, politik, dan ekonomi dalam relasi kuasa yang cukup berimbang dengan mengandalkan budaya berdemokrasinya (Diamond, 2003, Suyatno, 2004).

### **C. Trisula Demokrasi Harus Bekerja Komprehensif**

Jelaslah sudah kiranya demokrasi sebagai proses harus menapaki penemuan pola dan model yang tepat dalam bingkai ke-Indonesia-an secara kontekstual sebelum bermimpi tentang kesejahteraan. Untuk itu peran dan kerja sama komprehensif antara trisula demokrasi harus bisa diperjuangkan.

Pertama, negara atau *state* berperan sebagai sistem administrasi legal, birokratis dan koersif mengelola aparat negara dan menyusun hubungan antara kekuasaan rakyat dan pemerintah (Stephan, 1988). Paling sederhana dari perannya ini, negara adalah otoritas pembuat kebijakan dengan didasarkan pada kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Kedua, bersinergi dengan ranah bisnis – bukan berkonspirasi dengan pengusaha – melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung stimulasi produksi dan investasi terkendali. Di titik ini dunia wirausaha akan berkembang dan lapangan kerja dengan sendirinya terbuka bagi masyarakat yang merupakan rute kesejahteraan.

Ketiga, ranah rakyat harus dikembalikan ruang politiknya agar gerakan sosial individu maupun kelompok dan organisasi sipil dari semua kelas mengekspresikan diri dalam konstelasi politik guna memperoleh kontrol atas pemerintah dan aparat negara. Tanpa kerja sama dan kontrol rakyat terhadap elemen-elemen dasar negara maka ide, aspirasi, dan program kesejahteraan sulit terealisasi. Kerja sama dan kontrol diberikan agar elemen-elemen dasar negara yakni institusi-institusi negara berfungsi terlebih dahulu mengingat kebebasan, kekuasaan, keamanan, keadilan, dan otoritas publik terkait erat satu dengan lainnya (Fukuyama, 2003) yang menjadi prakondisi bagi terciptanya suatu kebijakan dan implementasinya.

---

### III. PENUTUP

#### Aksi Menuju Demokrasi Yang Menyejahterakan

Ada begitu banyak mimpi yang ingin dirilis di sini, namun keterbatasan adalah sekat segalanya. Walaupun begitu, beberapa catatan penting dapat diberikan demi mimpi demokrasi menuju kesejahteraan.

1. Demokrasi sebagai proses harus ditransformasi berbagai prosesnya yang kontekstual dalam logika partikular berbasis lokalitas – kalau bisa sampai pada tingkat paling kecil semisal desa dan keluarga (*klan* dan *marga*).

Logika ini harus didukung distribusi keyakinan bahwa demokrasi yang berlangsung di titik terkecil akan memiliki daya tanggung jawab dan daya merangkai demokrasi pada aras yang lebih besar. Juga, diterjemahkan sebagai beban pelayanan yang bahasa operasionalnya adalah kesejahteraan, bukan beban politik bagi aktor dan struktur dalam relasi kuasa.

Dengan logika ini, demokrasi nasional dibayangkan sebagai susunan dari proses demokrasi yang sudah terjadi di tingkat-tingkat yang lebih kecil. Dengan demikian, target dan sasaran demokrasi dapat diprediksi, dikawal, dan diukur hasilnya dengan tepat.

2. Inheren dengan itu, proses lanjut dari relasi kuasa antar aktor dan struktur harus bisa masuk dalam logika tadi. Demokrasi nasional yang terangkai dari lokus-lokus lokalitas harus selalu menjadi pintu seleksi para aktor dan struktur yang berinteraksi dalam relasi kuasa. Kecuali untuk birokrasi – sipil maupun militer, lembaga politik semisal legislatif, partai politik, dan media massa harus memainkan perannya secara obyektif.
  3. Khusus bagi legislatif dan partai politik, perlu dirumuskan format komunikasi reguler konstituen-partai politik-wakil rakyat di luar pemilu dan reses. Halnya juga dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) perlu ditemukan induk semang baginya dengan mendirikan semacam lembaga di daerah yang bekerja layaknya partai politik.
-

4. Mendorong dan mengadvokasi masyarakat agar kembali menghidupkan kelas dan asosiasi sosial kultural bagi perimbangan posisi tawar dalam relasi kuasa antar aktor maupun struktur.

Mengakhiri tulisan ini, penulis sepenuhnya sepakat dengan tawaran aksi-refleksi yang diajukan kawan-kawan dari Jurusan Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada dalam membentuk paradigma demokrasi ala Indonesia lewat dialektika perwacanaan yang terus menerus. Di samping itu aksi yang lebih operasional juga perlu diterjemahkan dan dilakukan secara berkelanjutan, riset maupun non riset.

Untuk sektor riset, perlu kiranya dilakukan studi-studi perbandingan politik secara lebih banyak baik di lingkup internal demokrasi Indonesia yang sedang berlangsung – antar wilayah – maupun eksternalnya dengan dikonsentrasikan pada negara-negara serumpun yang sudah mampu menyahterkan diri dengan berdemokrasi.

Sedangkan di sektor non riset, penguatan kapasitas kontrol oleh rakyat harus terus dilakukan terutama format kontrol dan komunikasi yang menghubungkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan penerima delegasi kedaulatan. Komunikasi dimaksud sejauh ini hanya berjalan 5 tahun sekali di mana partai politik kemudian mengambil alih seluruh rangkaian proses pengawalan dan pengawasan terhadap pemerintah yang hasilnya oligarki menjadi penghalang bahkan memisahkan hubungan rakyat dengan negara. Apapun itu, seluruh daya upaya yang perlu dilakukan bertujuan untuk meng-Indonesia-kan demokrasi Indonesia dalam relasi kuasa yang mutual dan komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik, 2009, 2010, 2011
- Budiman, Arief dan Olle Törnquist, 2001, “*Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan Di Indonesia*”, ISAI, Indonesia
- Diamond, Larry, 2003, “*Developing Democracy: Toward Consolidation*”, IRE Press, Yogyakarta
-

- Fukuyama, Francis, 2003, "*The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*", Qalam, Yogyakarta
- Huntington, Samuel P., 1984, "*Will More Countries Become Democratic?*", *Political Science Quarterly* 99, 2nd
- Lipset, Seymour Martin, 1959, "*Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy*", *The American Political Science Review*, Vol. 53, 1st
- Moore, Jr., Barrington, 1966, "*Social Origin of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*", Beacon Press, Boston
- Robison, Richard and Vedy R. Hadiz, 2004, "*Reorganising Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*", Routledge-City University of Hong Kong, South East Asia Series
- Societa, 2012, Edisi Pertama
- Stephan, Alfred 1988, "*Rethinking Military Politic: Brazil and the Southern One*", Prinseton University Press
- Suyatno, 2004, "*Menjelajahi Demokrasi*", Liebe Book Press, Yogyakarta
- [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)
-